

LAPORAN MEDIA CETAK

**Pj. Gubernur Jawa Tengah
Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M
(18 Februari 2025)**

Summary

| Media | News | Positive | Neutral | Negative |
|-------|------|----------|---------|----------|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |

Daily Statistic

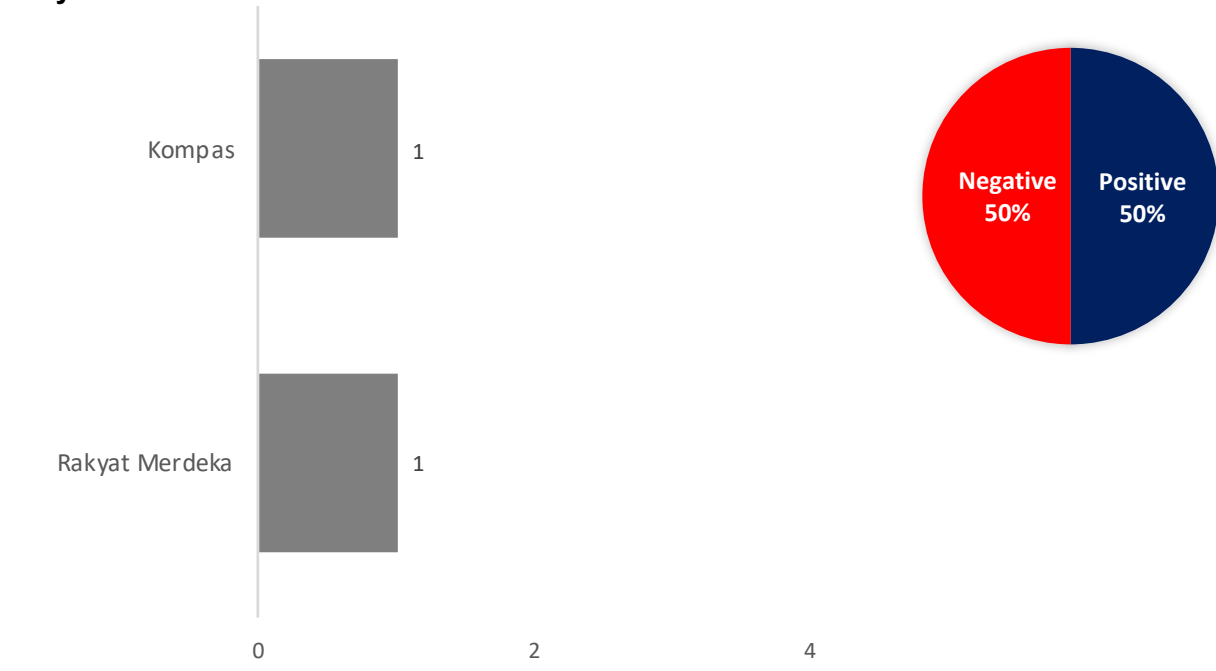


Table Of Contents : 18 Februari 2025

| No | Date | Media | News Title | Page | Sentiment | Influencers |
|----|------------------|----------------|---|------|-----------|--|
| 1 | 18 Februari 2025 | Kompas | Aparat Desa Paling Banyak Berada di Pusaran Kasus Korupsi | 1 | Negative | Reda Manthovani, Yandri Susanto, Muji Kartika Rahayu |
| 2 | 18 Februari 2025 | Rakyat Merdeka | KPU Jateng Minta Dana Hibah Non Pemilihan | 6 | Positive | |

| | | | |
|---------|---|----------|-----------------|
| Title | Aparat Desa Paling Banyak Berada di Pusaran Kasus Korupsi | | |
| Media | Kompas | Reporter | FRN/SPW/RSW/EKI |
| Date | 2025-02-18 | Tone | Negative |
| Page | 1 | PR Value | |
| Summary | <p>Dana desa yang seharusnya untuk pembangunan warga justru banyak diselewengkan aparat desa. Modus paling banyak yang dilakukan pelaku penyimpangan adalah memalsukan laporan dan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tim Kompas menganalisis 591 putusan kasus korupsi dana desa antara 2014 dan 2024 dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Ekstraksi putusan pengadilan dibantu kecerdasan buatan dengan verifikasi tim untuk memastikan akurasi informasi Dari hasil analisis, 591 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 640 terdakwa ini menyebabkan kerugian negara Rp 598,13 miliar.- Total 81,8% pelaku penyelewengan dana desa terdiri dari kepala desa, bendahara sekretaris, dan perangkat desa lain. Aceh tercatat sebagai provinsi dengan pelaku korupsi dana desa terbanyak, diikuti Jawa Tengah dan Sumatera Utara. | | |

PROGRAM DANA DESA

Aparat Desa Paling Banyak Berada di Pusaran Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Dana desa yang seharusnya untuk pembangunan warga justru banyak diselewengkan aparat desa. Modus paling banyak yang dilakukan pelaku penyimpangan adalah memalsukan laporan dan kegiatan.

Tim Jurnalisme Data Kompas menganalisis 591 putusan kasus korupsi dana desa antara 2014 dan 2024 dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Ekstraksi putusan pengadilan dibantu kecerdasan buatan dengan verifikasi tim untuk memastikan akurasi informasi.

Dari hasil analisis, 591 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 640 terdakwa ini menyebabkan kerugian negara Rp 598,13 miliar. Nilai ini setara dengan dana desa untuk 744 desa jika masing-masing menerima Rp 800 juta. Re-nelusuran data menunjukkan tren peningkatan jumlah terdakwa tiap tahun, dengan 6 dari 10 pelaku adalah kepala desa.

Bendahara desa merupakan pelaku terbanyak kedua (10,6 persen). Total 81,8 persen pelaku penyelewengan dana desa terdiri dari kepala desa, bendahara, sekretaris, dan perangkat desa lain. Aceh tercatat sebagai provinsi dengan pelaku korupsi dana desa terbanyak, diikuti Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Di tingkat kabupaten/kota, pelaku terbanyak terdapat di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan Sijunjung, Sumatera Selatan.

Kapasitas minim

Kepala desa, dengan kewenangan besar pengelolaan

JURNALISME DATA

BACA JUGA KUM 2

Anggaran melalui Undang-Undang Desa, sering terurus dalam praktik korupsi akibat minimnya pemahaman tentang tata kelola keuangan. Masalah ini diperburuk kurangnya pengawasan dan rendahnya integritas.

Pada Desember 2024, di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, bupati mencopot 14 kepala desa yang gagal mencari dana desa. Diduga karena mereka terlambat membuat laporan pertanggungjawaban.

Anggota DPRD TTS, Yusuf N Sora, mengatakan, masalah ini hanya sebagian kecil dari persoalan lebih besar dalam pengelolaan dana desa di TTS. Namun, menurut dia, masalah utama bukanlah niat memperkaya diri, melainkan banyak aparat desa belum memahami cara yang benar dalam mengelola dana desa.

"Mereka tidak mengerti aturan main, seperti petunjuk teknis. Ini persoalan sumber daya manusia," ujarnya.

Di TTS, banyak desa dipimpin kepala desa berlatar SMA, dengan aparat desa sebagian besar berlatar SD. Mereka kesulitan mengoperasikan laptop, padahal proses administrasi desa kini dilakukan secara digital.

Pengawasan lemah

Berdasarkan penelusuran Tim Jurnalisme Data Kompas,

sebanyak 43,78 persen pelaku korupsi dana desa adalah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat.

Analisis tim Kompas, modus korupsi yang paling sering ditemukan meliputi pengelompokan nilai pengadaan barang dan jasa, manipulasi surat pertanggungjawaban, dan penggelapan dana, yang dipicu minimnya digitalisasi sistem keuangan desa.

"Kami menemukan, banyak praktik korupsi hasil 'warisan' periode sebelumnya, cara-cara penyelewengannya diturunkan antarperangkat desa," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthoani.

Kejaksan kini mendorong perubahan administrasi keuangan desa dengan aplikasi Jaga Desa atau Jalsa Garda Desa yang memungkinkan desa menginput penggunaan dana desa secara langsung.

Menurut dia, korupsi kepala desa lebih mudah terdeteksi apabila warga terlibat dalam pengawasan, verifikasi pembangunan fisik mudah dilakukan, dan transaksi keuangan lebih sederhana.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, kepala desa sering terjerumus dalam penyelewengan akibat keterbatasan kemampuan mengelola anggaran dan tekanan pejabat atau titipan preyek.

Untuk mencegahnya, pemerintah memperkuat kolaborasi dengan PPATK, Polri, KPK, dan Kejaksaan melalui aplikasi Jaga Desa.

"Kami ingin memastikan

(Berlanjut ke hlm 15 kol 6-7)

Aparat Desa Paling Banyak

(Sambungan dari halaman 1)

tidak ada satu oknum pun yang membancak dana desa," ujar Muji.

Selain pengawasan administratif, penindakan hukum tetap menjadi langkah terakhir bagi kepala desa yang tidak dapat dibina. Jika sudah didampangi tetapi tetap menyimpang, pihaknya meminta penegak hukum tidak ragu menindak.

Tidak ada efek jera

Meskipun mayoritas pelaku korupsi adalah kepala desa, informasi yang dihimpun Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan, kerugian negara terbesar justru disebabkan oleh perangkat desa di luar kepala desa, bendahara, dan sekretaris. Besarnya Rp 2,35 miliar per orang. Kerugian oleh pelaku dari organisasi masyarakat Rp 1,5 miliar, sementara kepala desa Rp 1,36 miliar per orang.

Pengamatan hakim *ad hoc* tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya, Muji Kartika Rahayu, kasus korupsi dana desa, selain melibatkan kepala desa dan perangkat desa, juga melibatkan pihak lain, mulai dari kontraktor hingga pegawai di kecamatan dan ASN di kabupaten.

"Mayoritas penegakan hukum tipikor menasar kepala desa karena dalam hierarki politik, mereka adalah rantai terlemah sehingga semua tanggung jawab ditimpakan ke mereka," ujar Muji.

Menurut dia, saat kepala desa terjerat korupsi, kepala daerah dan staf inspektorat cenderung menghindari dari tanggung jawab. Padahal, seharusnya mereka yang pertama mengambil langkah korektif.

Muji juga menilai, banyaknya kasus korupsi dana desa di pengadilan belum memberi efek jera.

Denda atau uang pengganti sering tidak dibayar dan penyitaan aset jarang dilakukan karena uang hasil korupsi sudah habis. "Kerugian negara dan masyarakat tidak terpulihkan,"

ujar Muji.

Kholidin (28), warga Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, mengaku tak merasakan kemajuan di desanya selama 10 tahun terakhir. Rencana pembangunan, seperti dermaga dan perumahan su-ngai yang tertera di balihjo pada 2018, hingga kini belum terlaksana.

Desa Citemu pernah dilanda kasus korupsi dana desa. Sang kepala desa, Supriyadi, divonis 4 tahun penjara setelah terbukti menggelapkan APBDes dan merugikan negara Rp 818,7 juta.

Tolak ukur kinerja

Kepala Pusat Studi Desa dan Kawasan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Andreas Pandiangan menyoroti fungsi inspektorat yang belum optimal karena audit hanya dilakukan setelah penyimpangan terjadi dan masih mengandalkan uji petik.

Untuk itu, pengawasan warga harus diperkuat dengan mendorong transparansi penggunaan dana.

Pemerintah daerah perlu memastikan kecukupan sumber daya inspektorat, pendampingan berkelanjutan, penerapan sanksi tegas, dan evaluasi berkala terhadap kinerja kepala desa. "Keberhasilan desa bisa dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah kabupaten dan kecamatan," ujar Pandiangan.

Seira Tamara, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), mengkritik sistem pengawasan yang memungkinkan laporan fiktif lolos. Menurut dia, harus ada verifikasi lapangan, tidak hanya administrasi.

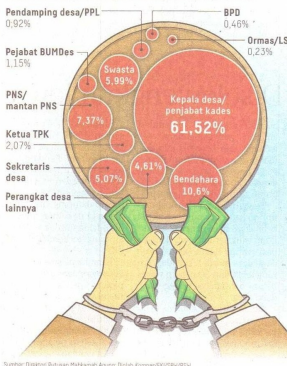
"Kuitansi seadanya, sudah bisa 'tercentang' dalam laporan keuangan. Harusnya dicek ke lapangan, ada atau tidak," ujarnya.

Menurut dia, pengawasan dan keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencegah korupsi, terutama dengan perbaikan sistem *monitoring* evaluasi yang lebih ketat.

(FRN/SPW/RSW/EKI)

Pelaksanaan Pelaku Korupsi Dana Desa 2015-2024

Enam dari 10 pelaku korupsi dana desa adalah kepala desa.



Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Ekstraksi putusan pengadilan dibantu kecerdasan buatan



| | | | |
|---------|--|----------|----------|
| Title | KPU Jateng Minta Dana Hibah Non Pemilihan | | |
| Media | Rakyat Merdeka | Reporter | TIF |
| Date | 2025-02-18 | Tone | Positive |
| Page | 6 | PR Value | |
| Summary | <p>Koabmisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tidak menghabiskan seluruh anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah serentak 2024 lalu. Dari total anggaran sebesar Rp 791 miliar, tersisa sebesar Rp 150 miliar.</p> <ul style="list-style-type: none">- “Kami bisa menghemat (setidaknya) paling sedikit Rp 150 miliar, karena kami masih berproses untuk penggunaan anggaran selama dua bulan ke depan,” ujar Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono dalam keterangannya; Senin (17/2/2025). Handi mengatakan, dana hasil efisiensi anggaran itu rencananya dikembalikan ke Pemprov Jawa Tengah Keberhasilan efisiensi ini, kata dia.- Ke depan, Handi menambahkan, pihaknya akan melaksanakan beberapa kegiatan lanjutan. Seperti akan mengajukan bantuan dana hibah non-pemilihan kepada Pemprov Jawa Tengah. Permohonan dana hibah non-pemilihan untuk perbaikan fasilitas di Kantor KPU Jawa Tengah, seperti pekerjaan akses ramah disabilitas; perbaikan aula, dan sebagainya, jelasnya.- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengapresiasi KPU Jawa Tengah atas kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Sejak awal, dia bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) selalu mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. | | |

Kembalikan Duit Rp 150 Miliar

KPU Jateng Minta Dana Hibah Non Pemilihan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tidak menghabiskan seluruh anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng serentak 2024 lalu. Dari total anggaran sebesar Rp 791 miliar, tersisa sebesar Rp 150 miliar.

“Kami bisa menghemat (setidaknya) paling sedikit Rp 150 miliar, karena kami masih berproses untuk penggunaan anggaran selama dua bulan ke depan,” ujar Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

Handi mengatakan, dana hasil efisiensi anggaran itu rencananya dikembalikan ke Pemprov Jateng. Keberhasilan efisiensi ini, kata dia, bukti nyata komitmen KPU Jateng dalam mengelola anggaran secara efektif dan transparan.

“Ini jadi catatan positif bagi kami sebagai (instansi) penyelenggara pemilu yang menerima dana hibah,” kata dia.

Ke depan, Handi menambahkan, pihaknya akan melaksanakan beberapa kegiatan lanjutan. Seperti akan mengajukan bantuan dana hibah non-pemilihan kepada Pemprov Jateng.

“Permohonan dana hibah non-pemilihan untuk perbaikan fasilitas di Kantor KPU Jateng, seperti pekerjaan akses ramah disabilitas, perbaikan aula, dan sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, Handi menambahkan, pihaknya telah melakukan penghematan anggaran untuk rapat tatap muka dan perjalanan dinas sebesar 30 persen. Hal ini, kata dia, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

“Jadi KPU Jateng akan memperbanyak kegiatan berbasis daring atau online,” kata dia.

Sebagai wujud efisiensi ini, Handi mengatakan, sudah dilakukan dalam Rapat Pleno Ter-

buka Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Jateng terpilih pada Rabu (5/2/2025). Pada penetapan itu, kata dia, pihaknya tidak mengundang perwakilan KPU kabupaten/kota se Jateng secara langsung.

“(Saat rapat pleno) acaranya sudah bisa dilakukan secara daring,” kata dia.

KPU Jateng, tegas Handi, berkomitmen untuk menjalankan instruksi presiden tersebut. Bahkan, kata dia, alokasi anggaran yang sebelumnya telah dirancang bakal disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang ada.

Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengapresiasi KPU Jateng atas kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Sejak awal, dia bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) selalu mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

“Kami mengapresiasi langkah efisiensi anggaran yang dilakukan KPU Jateng, bahkan bakal mengembalikan sisa dana hibah kepada Pemprov Jateng,” kata Nana dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

Menurut Nana, kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif tidak lepas dari peran aktif berbagai elemen masyarakat.

“Terima kasih kepada penyelenggara pemilu, TNI, Polri, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” ujarnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menekankan, keberhasilan Pilkada serentak 2024 merupakan cerminan dari semangat demokrasi dan kerjasama lintas sektor di Jateng. Proses yang transparan dan partisipatif ini, kata dia, diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan baru yang akan datang. ■ TIF